

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan suatu proses sistematis dalam penelitian dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai teori, konsep, dan gagasan dari sumber-sumber literatur literatur yang relevan dengan topik atau permasalahan penelitian. Kajian ini mencakup pengumpulan informasi dari buku, jurnal ilmiah, dokumen serta laporan penelitian yang dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap isu yang dikaji. Maka dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang menggambarkan temuan-temuan yang korelevan dengan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kajian ini memberikan referensi awal dan membandingkan antara pendekatan serta hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian kajian penelitian terdahulu menjadi penting sebagai dasar teoritis dan metodologis agar penelitian yang dilakukan tidak lepas dari konteks ilmiah yang sudah ada. Dalam hal ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan fokus dan tujuan penelitian, kajian tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	1	2	3
Nama (Name)	Ratri Zainita	Ni Wayan Idayani	Ira Sri Mawarni Hasibuan, Fretty Salma Annisa, Nurul Rahmawati, Fitriani Pramita Gurning
Jenis Luaran Laporan Penelitian	Artikel Ilmiah (Jurnal Ilmiah)	Artikel Ilmiah (Jurnal Ilmiah)	Artikel Ilmiah (Jurnal Ilmiah)
Tahun	2024	2026	2024
Universitas (University)	Universitas Wijaya Putra	STISIP Margarana	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Judul	Efektivitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Bpjs Kesehatan Dalam Meningkatkan Kunjungan Pasien Dan Pelayanan Kesehatan Di Klinik Mata Pandaan	Efektivitas Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Puskesmas Kediri III	Efektivitas Pelaksanaan Program JKN di Puskesmas Bestari
Latar Belakang Historis (Historical Background)	Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia agar memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Sejak	Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan	Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang mulai diterapkan sejak tahun 2014 sebagai bentuk pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program ini bertujuan memberikan jaminan pelayanan

	diterapkan pada tahun 2014, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Klinik Mata Pandaan sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mengalami peningkatan jumlah kunjungan pasien serta perubahan kualitas pelayanan kesehatan setelah implementasi program JKN. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti regulasi, infrastruktur, dan kebijakan internal pelayanan kesehatan yang perlu dikaji lebih lanjut.	akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Dalam implementasinya, pelayanan kesehatan di puskesmas menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan program JKN. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan fasilitas, waktu tunggu pelayanan, dan peningkatan jumlah pasien yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan.	kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar memperoleh akses kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas.
Konteks Kekinian Terkait dengan Topik (<i>current Context</i>)	Pelaksanaan program JKN BPJS Kesehatan saat ini menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan. Program ini mendorong fasilitas kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi	Saat ini JKN menjadi program strategis nasional yang terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Keberhasilan program tidak	Dalam perkembangannya, program JKN telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun, dalam

	operasional, serta sistem informasi pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi. Klinik Mata Pandaan menjadi salah satu contoh fasilitas kesehatan yang merasakan dampak positif implementasi JKN melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, kualitas layanan, dan kepuasan pasien.	hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari efektivitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.	pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, seperti pemahaman masyarakat terhadap manfaat program dan optimalisasi pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan.
Teori-Teori yang telah dan sedang dipergunakan penelitian lain (<i>Theories Underpinning</i>)	Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Mathis (2001) yang menjelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, digunakan pula teori pelayanan kesehatan menurut Soekidjo Notoatmodjo yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Penelitian juga mengacu pada konsep Program Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40	Penelitian ini menggunakan teori efektivitas pelayanan menurut Soekidjo Notoatmodjo yang menekankan empat indikator, yaitu: 1. Ketersediaan dan keberlanjutan pelayanan 2. Pelayanan yang dapat diterima masyarakat 3. Kemudahan akses pelayanan 4. Mutu pelayanan kesehatan	Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program menurut Richard M. Steers yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui pencapaian tujuan, kemampuan adaptasi, integrasi, dan keberlangsungan program. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Program JKN mampu mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

	Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.		
Mendudukan terminologi-terminologi yang relevan yang dipergunakan dalam berbagai penelitian sejenis (Terminology) Metode Penelitian	Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari pasien Klinik Mata Pandaan, staf medis, dan manajemen klinik. Penelitian berfokus pada efektivitas program JKN BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kunjungan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian terdiri dari petugas kesehatan dan masyarakat peserta JKN. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program JKN dalam pelayanan kesehatan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pelayanan kesehatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, yaitu kepala puskesmas dan pasien pengguna JKN di Puskesmas Bestari. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program JKN, kualitas pelayanan yang diberikan, serta hambatan yang ditemukan

			selama program berlangsung.
Penjelasan bukti-bukti terkait pentingnya topik riset ini (Significant) Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program JKN di Puskesmas Kediri III telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, berkurangnya beban biaya pengobatan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Namun, masih terdapat hambatan berupa lamanya antrean pelayanan ketika jumlah pasien meningkat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program JKN di Puskesmas Kediri III telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, berkurangnya beban biaya pengobatan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Namun, masih terdapat hambatan berupa lamanya antrean pelayanan ketika jumlah pasien meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program JKN sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pelaksanaan yang baik dapat meningkatkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program JKN di Puskesmas Bestari sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, sikap petugas yang ramah, serta adanya manfaat berupa pelayanan dan pengobatan tanpa biaya. Namun, masih ditemukan kendala yaitu belum optimalnya pemahaman masyarakat terkait manfaat dan penggunaan Program JKN, sehingga diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan.

		akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.	
Penjelasan Keunggulan Penelitian yang kita lakukan (Research Gap)	Berfokus pada efektivitas Program JKN BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kunjungan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan khusus yaitu Klinik Mata Pandaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis memiliki keunggulan karena berfokus pada efektivitas Program JKN dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di UPT Puskesmas Tanjungpandan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Penelitian ini tidak hanya melihat peningkatan kunjungan pasien, tetapi juga menganalisis kualitas pelayanan publik, kemudahan akses layanan kesehatan, kepuasan masyarakat, serta pelaksanaan	Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas pelaksanaan JKN bagi masyarakat kurang mampu di Puskesmas Kediri III, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada Analisis Efektivitas Program JKN dalam meningkatkan pelayanan masyarakat secara umum di UPT Puskesmas Tanjungpandan Kabupaten Belitung, sehingga memiliki perbedaan pada lokasi penelitian, karakteristik masyarakat, dan kondisi pelayanan kesehatan yang diteliti dan bagaimana Program JKN berkontribusi	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan Program JKN dari aspek pelayanan kesehatan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap program di Puskesmas Bestari. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada efektivitas Program JKN di UPT Puskesmas Tanjungpandan dengan mengkaji pelayanan masyarakat secara lebih luas, meliputi kemudahan akses pelayanan, ketepatan pelayanan, respons petugas kesehatan, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN. Dengan demikian, penelitian ini

	pelayanan JKN secara langsung di lingkungan puskesmas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pembahasan yang lebih spesifik terhadap efektivitas pelayanan JKN pada tingkat pelayanan kesehatan dasar yang berhubungan langsung dengan masyarakat.	dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kemudahan akses layanan, ketepatan pelayanan, serta respons petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai efektivitas Program JKN pada tingkat pelayanan kesehatan daerah.	diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi pelayanan kesehatan di daerah penelitian.
--	--	--	---

2.1.2 Konsep dan Teori

2.1.2.1 Konsep Administrasi

Administrasi adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kata administrasi berasal dari bahasa latin yaitu “ad” dan

“ministrate” yang artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa Inggris disebut *“administration”* artinya *“to serve”*. Dengan demikian administrasi kemudian dimaknai sebagai upaya melayani dengan sebaik-baiknya. Beberapa definisi berikut memberikan pengertian administrasi secara berbeda.

Dalam pengertian sempit administrasi dikatakan oleh Soewarno Handyaningrat (1988:2), sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda, sebagai berikut : *“Administrasi secara sempit berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringkas, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”*. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan sebatas ketatausahaan yang, meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrasi menurut **Irra Chisyanti dewi (2011:3)** dalam buku **“Pengantar Administrasi”** mengatakan bahwa administrasi memiliki arti yaitu sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretariatan, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim dan menyimpan.

Definisi menurut **irra chisyanti dewi** dalam bukunya **“Pengantar Administrasi (2011:3)**, administrasi diartikan sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan atau kesekretariatan, yang meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Ini

menggarisbawahi bahwa administrasi mencakup berbagai kegiatan yang bersifat teknis dan praktis, berfokus pada pebgelolaan informasi dan dokumentasi. Kegiatan tersebut mendukung operasional organisasi dengan memastikan alur berjalan lancar, mulai dari penerimaan hingga penyimpanan data. Hal ini mencerminkan esensi dari administrasi sebagai fungsi pendukung.

Menurut **The Liang Gie** yang dikutip **Sahya Anggara** dalam bukunya **Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori,dan Fakta dalam Upaya Menciptakan *Good Governance* (2016:21)** yaitu:"Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraa dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu"

Definisi administrasi menurut The Liang Gie, seperti yang disampaikan oleh Sahya Anggara, menyoroti pentingnya kerja sama dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Administrasi dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk mengatur kegiatan kelpok. Ulasan ini menekankan aspek kerja sama, penelenggaraan kegiatan, dan tujuan yang jelas dalam administrasi.

Menurut Sondang **P.Siagian (2004:2)** yang dikutip dalam buku **Pasolong,n.d, (2017)** yang berjudul "Teori Administrasi Publik" yaitu: "Administasi adalah keseluruhan proses Kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya"

Definisi administrasi menurut Sondang P. Siagian, seperti yang dijelaskan dalam buku "Teori Administrasi Publik" oleh Pasolong, menyoroti kerjasama antara

individu atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan rasionalitas tertentu. Ini menekankan pentingnya kolaborasi yang terorganisir dan pemikiran yang terarah dalam mengelola kegiatan administratif. Dengan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, definisi ini menegaskan bahwa administrasi haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang sistematis dan efektif.

Menurut **Leonard D. White** dalam **Syafie 1999** dkk dikutip dan jural dalam buku **Pasolong,n.d, (2017)** yang berjudul "Teori Administrasi Negara" memberikan definisi yaitu:

“Administrasi adalah suatu proses yang terdapat secara umum dalam segala usaha kelompok manusia, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran kecil maupun besar.”

Definisi administrasi menurut Leonard D. White, seperti yang dikutip dalam buku "Teori Administrasi Negara" oleh Pasolong, menekankan bahwa administrasi merupakan suatu proses yang ditemukan secara umum dalam berbagai usaha kelompok manusia, tanpa memandang apakah itu lembaga pemerintah atau swasta, sipil atau militer, serta dalam berbagai skala ukuran. Ulasan ini menyoroti sifat universal administrasi yang mencakup beragam konteks organisasional, menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien dan efektif di semua bidang.

Dalam berbagai definisi yang dikutip, kesimpulannya adalah bahwa administrasi melibatkan serangkaian Tindakan yang berkaitan dengan pengaturan, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan, baik dalam lingkup pemerintah maupun organisasi swasta. Pentingnya Kerjasama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu merupakan tema yang muncul dalam banyak definisi. Ini

menunjukkan bahwa administrasi memegang peran sentral dalam menjalankan kegiatan organisasional dengan efisien dan efektif, serta dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Bersama.

2.1.2.2 Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik adalah cabang dari ilmu administrasi yang berfokus pada penyelenggaraan dan pengelolaan kebijakan serta pelayanan publik oleh pemerintah atau institusi negara kepada masyarakat. Administrasi publik mencakup aktivitas-aktivitas seperti perumusan kebijakan publik, pelaksanaan program pemerintah, manajemen organisasi publik, hingga evaluasi kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Administrasi publik **menurut Chandler & Plano yang dikutip Harbani**

Pasolong (2019:8) menjelaskan bahwa:

"Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi public sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan - perbaikan terutama di bidang, sumber daya manusia dan keuangan"

Deskripsi administrasi publik menurut Chandler & Plano, yang disitir oleh Harbani Pasolong, menyoroti sifat gabungan dari seni dan ilmu. Administrasi publik dilihat sebagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengatur urusan publik dan menjalankan berbagai tugas yang ditugaskan. Definisi ini menegaskan bahwa administrasi publik memiliki tujuan yang jelas, yaitu memecahkan masalah-masalah publik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Ini menekankan pentingnya perbaikan terus-menerus dalam administrasi publik, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya dan peningkatan

kinerja organisasi. Administrasi Publik di definisikan oleh **Nigro & Nigro yang dikutip Mariani (2017:19)** mengatakan bahwa:

"Adminsitasi adalah usaha Kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif legislatif dan eksekutif, mempunyai peranan penting sehingga menjadi bagian dari proses politik, sangat berbeda dengan cara - cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menekankan proses kelembagaan yang melibatkan usaha Kerjasama kelompok sebagai kegiatan publik yang berbeda dari kegiatan swasta"

Deskripsi dalam administrasi publik menurut Nigro & Nigro, seperti yang diungkapkan dalam kutipan Mariani, menyoroti peran penting kerjasama kelompok dalam konteks lingkungan publik, termasuk semua cabang pemerintahan. Definisi ini menekankan bahwa administrasi publik tidak hanya sebuah proses manajemen,

Tetapi juga merupakan bagian integral dari proses politik. Perbandingan dengan administrasi swasta dan individu juga ditekankan, menekankan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Ulasan ini menyoroti peran kerjasama kelompok dalam administrasi publik dan perbedaannya dengan praktik: administrasi di sektor swasta.

David (2005) yang dikutip dalam buku **Pasolong, n.d, (2017)** yang berjudul "Teori Administrasi Publik", mengemukakan bahwa sebagai berikut:

"Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau bagian"

Deskripsi yang dikemukakan oleh David, yang dikutip dalam buku "teori Administrasi Publik" oleh Pasolong, menekan bahwa administrasi publik melibatkan pemanfaatan teori dan proses manajemen, politik, dan hukum untuk

memenuhi keinginan pemerintah. Ini menyoroti pentingnya administrasi dalam mendukung fungsi regulasi dan pelayanan kepada masyarakat, baik secara keseluruhan maupun dalam bagian tertentu. Ulasan ini menekankan integrasi antara teori dan praktik administrasi publik dalam mencapai tujuan pemerintah.

Dwight Waldo (2012:20) dalam buku **Teori Administrasi Publik (Pasolong, 2019)** mendeskripsikan bahwa administrasi publik adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Definisi Dwight Waldo tentang administrasi publik menyatakan bahwa ini adalah tentang mengelola manusia dan peralatan untuk mencapai tujuan pemerintah. Ini menekankan peran penting organisasi dan manajemen dalam konteks administrasi publik. Ulasan ini menyoroti fokus pada implementasi tujuan pemerintah melalui pengelolaan yang efektif dari sumber daya manusia dan peralatan yang tersedia.

Sementara itu, **Nigro (2016:14)** merumuskan bahwa administrasi publik dapat didefinisikan menjadi beberapa poin di bawah seperti berikut:

1. Upaya berbagai kelompok yang kooperatif di setting publik.
2. Mencakup tiga lembaga negara- eksekutif, legislatif, yudikatif- yang semuanya saling terhubung.
3. Berperan penting dalam perumusan kebijakan publik dan karenanya menjadi bagian dari proses politik.
4. Berbeda secara signifikan di hal-hal tertentu dari administrasi swasta.
5. Berkaitan erat dengan kelompok-kelompok swasta dan individu-individu terkait penyediaan jasa dan layanan bagi komunitas.

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (1970:21) dalam bukunya **Teori Administrasi Publik (Pasolong, 2019)** mendeskripsikan beberapa penjelasan administrasi publik:

1. Administrasi publik sebuah kerjasama antar kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. Administrasi publik dapat meliputi beberapa cabang pemerintahan diantaranya eksekutif, Legislatif serta yang berhubungan diantara mereka.
3. Memiliki peran penting terhadap perumusan sebagai proses politik dan implementasi kebijakan pemerintah.
4. Administrasi publik sangat berkaitan dan erat dengan berbagai macam-macam individu dan kelompok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Administrasi publik dalam beberapa hal dapat berbeda pada penempatan terhadap definisi administrasi perseorang.

Deskripsi yang disajikan oleh Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro memberikan gambaran menyeluruh tentang administrasi publik. Mereka menekankan bahwa administrasi publik melibatkan kerjasama antar kelompok dalam pemerintahan, termasuk berbagai cabang pemerintahan. Administrasi publik juga memainkan peran penting dalam proses politik, implementasi kebijakan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Definisi administrasi publik dapat bervariasi tergantung pada konteks administratif yang spesifik.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah disiplin yang kompleks, melibatkan berbagai aspek seni, ilmu, dan kerjasama antar kelompok dalam pemerintahan. Peran administrasi publik sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, menangani masalah-masalah publik, dan memastikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

2.1.2.3 Konsep Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan

“kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

2.1.2.4 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah konsep yang kompleks dan mencakup berbagai pandangan yang berbeda dari para ahli. Pada dasarnya, kebijakan public merujuk

pada serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik juga berkaitan dengan cara pemerintah atau aktor-aktor yang terlibat dalam pemerintahan merespons masalah-masalah yang muncul dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Dwidjowijoto, 2012: 119—120).

Publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat (Irfan Islamy dalam Sulistio, 2013: 3).

Menurut Anderson (dikutip Leo Agustino, 2016:7) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

2.1.2.5 Konsep Efektivitas

Dari segi etimologi, kata “efektif” yang digunakan di Indonesia memiliki asal usul dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata “*effective*”. Makna dari kata ini adalah berhasil atau suatu tindakan yang dilakukan dengan baik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “efektivitas” memiliki beberapa interpretasi, seperti akibat, pengaruh, kesan, manjur, dan dapat membawa hasil. Dalam kamus ilmiah populer, efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil yang berguna, serta mendukung pencapaian tujuan.

Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu pula sebaliknya (**Agustina, 2020:36**). **Dalam buku Purwanti (2022:44)** mengemukakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Definisi menurut **Subagyo (2000) dalam Budiani (2009)** mengemukakan bahwa :

“Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya.”

Berdasarkan definisi tersebut efektivitas dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antar output suatu tindakan atau kegiatan dengan tujuan yang telah diteapkan sebelumnya. Artinya, efektivitas terjadi ketika hasil dari suatu tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. Jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu dan tindakan tersebut mencapai hasil atau akibat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki seblumnya, maka tindakan tersebut dapat dikatakan efektif. Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tindakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari

keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Menurut Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan

Berdasarkan uraian di atas bahwa efektivitas menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa yang diinginkan. Efektivitas dilihat dari seberapa baik hasil kegiatan mendekati atau sesuai dengan sarana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil kegiatan mendekati atau bahkan melebihi sarana yang telah ditetapkan, maka itu menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi.

Sedangkan menurut **Siagan (2001:24)**, yaitu:

” Efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu dalam jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sarana yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sarana kegiatan, berarti makin tinggi efektivitasnya.”

Berdasarkan uraian di atas bahwa efektivitas menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa yang diinginkan. Efektivitas dilihat dari seberapa baik hasil kegiatan mendekati atau sesuai dengan sarana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil kegiatan mendekati atau bahkan melebihi sarana yang telah ditetapkan, maka itu menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi.

2.1.2.6 Konsep Program

Program merupakan perencanaan yang disusun oleh individu atau kelompok untuk mencapai prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dapat dilihat berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, kemudian diimplementasikan dalam bentuk program tertentu.

Purwanto (2020:116) menyatakan bahwa:

"Program adalah produk dari perencanaan yang berisi kegiatan atau rangkaian kegiatan berdasarkan perencanaan yang bersumber dari data yang valid dan memadai untuk menghasilkan capaian dan rencana yang telah disusun. Capaian dan rencana yang dimaksud tentunya memiliki suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan program"

Berdasarkan pemaparan teori di atas bahwa program adalah hasil dari perencanaan yang didasarkan pada data valid dan memadai. Program ini terdiri dari kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan program. Dengan kata lain, perencanaan yang baik dan berbasis data sangat penting untuk menghasilkan program yang efektif dan sesuai dengan tujuannya.

Menurut **Siagan (2006:117)** dalam bukunya **Manajemen Sumber Daya**

Manusia mengatakan bahwa:

"Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk kegiatan."

Berdasarkan pendapat di atas menjelaskan bahwa program adalah rincian dari suatu rencana besar, khususnya dalam konteks pembangunan nasional. Program ini mencakup berbagai kegiatan spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Siagan menekankan bahwa perumusan program adalah langkah penting untuk mengubah rencana strategi menjadi tindakan

konkret dan terukur. Hal ini menunjukkan pentingnya detail dan perencanaan yang sistematis dalam memastikan bahwa tujuan pembangunan nasional dapat dicapai melalui implementasi kegiatan terstruktur dan tepat sasaran.

2.1.2.7 Konsep efektivitas program

Efektivitas program menjadi kriteria untuk menilai sejauh mana sebuah program berjalan dengan hasil yang dianggap efektif. Evaluasi ini mempertimbangkan sejauh mana usaha dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Dalam konteks efektivitas program, terdapat tingkat keberhasilan yang diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah dicapai. Namun, apabila tujuan dari rencana dan tindakan tidak tercapai, hal tersebut dianggap sebagai ketidakefektifan program.

Makmur (2015:7) berpendapat tentang unsur dari eketivitas sebagai berikut:

"Unsur - unsur efektivitas antara lain:

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Keteatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berpikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan sasaran

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti beranggapan bahwa efektivitas memiliki beberapa unsur seperti ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan sasaran. Eketivitas akan tercapai apabila unsur - unsur tersebut dapat diperhatikan

Ditjen Binlantas Depnaker, 1993, dalam (Setiawan 1998) bahwa: "Efektivitas program adalah suatu penilaian terhadap Tingkat kesesuaian program yang merupakan salah satu cara dalam upaya untuk mengukur sebuah efektivitas pada suatu program. Efektivitas pada sebuah program ini dapat diketahui yaitu dengan membandingkan tujuan program dengan output dari program

Berdasarkan pendapat diatas menjelaskan bahwa efektivitas sebuah program diukur dengan mengevaluasi sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh dari program tersebut. Dengan demikian, efektivitas program dapat dinilai berdasarkan sejauh mana kesesuaian antara tujuan dan output yang dihasilkan.

Sedangkan menurut **Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017)** menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan karakteristik berikut:

1. Ketepatan sasaran program berkenaan dengan sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program berkenaan dengan kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Tujuan program berkenaan dengan sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Sedangkan **Duncan dalam Streers** menjelaskan bahwa sejauhmana suatu organisasi dapat memperoleh dan menggunakan sumber daya yang ada untuk dapat

mencapai tujuan operasionalnya. Dalam meneliti efektivitas maka diperlukan tiga konsep yang saling terkait harus dipertimbangkan secara bersamaan yaitu:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Berdasarkan indikator pengukuran diatas dapat diartikan dalam pencapaian tujuan terdapat proses dari awal tahapan hingga akhir tahapan yang disebut dengan periodisasi, kemudian dalam integrasi terdapat sosialisasi sebagai komunikasi dengan berbagai macam organisasi. Dan yang terakhir dalam adaptasi terdapat proses penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Maka ketiga hal tersebut harus terpenuhi agar suatu kegiatan itu dikatakan efektif.

Adapun **Riant Nugroho (2011:650-652)** mengemukakan bahwa pada prinsipnya ada lima dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan ataupun program. Berikut ini lima dimensi dari Teori **Riant Nugroho (2011:650-652)** yaitu:

1. Tepat kebijakan
2. Tepat pelaksanaan
3. Tepat target
4. Tepat lingkungan
5. Tepat proses

Berdasarkan dimensi pengukuran efektivitas diatas dapat diartikan dalam tepat kebijakan terdapat tiga sisi yang penting yakni sejauh mana kebijakan telah memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

Menurut **Edy Sutrisno (2018:125-126)** mengemukakan bahwa untuk mewujudkan suatu program yang efektif maka diperlukan pengukuran program dengan lima indikator yang saling berkaitan yaitu:

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas diatas dapat diartikan dalam pemahaman program dilihat untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami program. Lalu dalam tepat sasaran dilihat dari bagaimana pemerintah merealisasikan program ini kepada masyarakat sebagai sasaran. Kemudian dalam tepat waktu dilihat melalui penggunaan waktu pelaksanaan program yang telah direncanakan. Selain itu dalam tercapainya tujuan dilihat melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan. Dan yang terakhir dalam perubahan nyata dilihat sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi penerima program.

2.1.2.8 Indikator efektivitas program

Menurut Campbell JP (1989:47) menjelaskan bahwa efektivitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara komprehensif sehingga efektifitas dapat diartikan sebagai Tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Maka dalam mewujudkan sasaran tau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya diperlukan pengukuan efektivitas yang relevan yakni

Menurut Campbell dalam Mutiarin (2014):

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Kesesuaian Input dan Output
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Berdasarkan karakteristik efektifitas diatas dapat diartikan dalam pemahaman program dilihat untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami program. Lalu dapat dalam tepat sasaran dilihat dari bagaimana pemerintah merealisasikan program in kepada masyarakat sebagai sasaran. Selain itu, dalam tercapainya tujuan dilihat melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa suatu program dikatakan efektif apabila dilihat berdasarkan rencana dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada Masyarakat dengan waktu yang telah ditetapkan.

Kemudian pada penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas Campbell dalam Mutiarin (2014) karena peneliti ingin mengetahui Analisis Efektivitas Program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di UPT Puskesmas Tanjungpandan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

Tabel 2. 2 Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri.

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40 – 59,99	Tidak Efektif
60 – 79,99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Sumber : Litbang Depdagri 1991 dalam Budiani (2009)

2.1.2.9 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sistem jaminan sosial di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia

dengan tujuan menjamin agar seluruh penduduk memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan serta meningkatkan akses Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Program ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan tidak mampu. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) didasarkan pada prinsip sistem pelayanan kesehatan yang berjenjang.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program publik yang diimplementasikan di UPT Puskesmas Belitung Adalah Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta JKN di wilayah kerja puskesmas tersebut. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di UPT Puskesmas Belitung meliputi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, mencegah dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang sakit, membantu proses pemulihan kesehatan pasien serta memberikan pelayanan administrasi kepesertaan JKN dan melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran ini, diharapkan dapat mempermudah pembaca untuk memahami alur pikiran peneliti. Efektivitas pada suatu program menjadi sebuah topik yang sangat menarik untuk diteliti, karena sebagaimana yang diketahui pada saat ini banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan berbagai kebijakan lalu di implementasikan dalam bentuk sebuah program akan tetapi belum tentu berjalan

dengan efektif.

Uma Sekaran (dalam Sugiyono 2017:60) menjelaskan bahwa: "Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menjabarkan adanya hubungan teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah penting. Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti mengemukakan teori-teori dari para ahli yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai kerangka pemikiran"

Deskripsi mengenai kerangka untuk mengetahui bagaimana Analisis Efektivitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di UPT Puskesmas Tanjungpandan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Efektivitas disini melihat sejauh mana program tersebut berjalan dengan efektif. Maka dari itu **Campbell J.P Dalam Mutiarin (2014)**; menyatakan bahwa untuk mengetahui efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan 5 (Empat) Karakteristik sebagai berikut:

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Kesesuaian Input dan Output
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Sedangkan menurut **Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017)** menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan karakteristik berikut:

1. Ketepatan sasaran program berkenaan dengan sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program berkenaan dengan kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

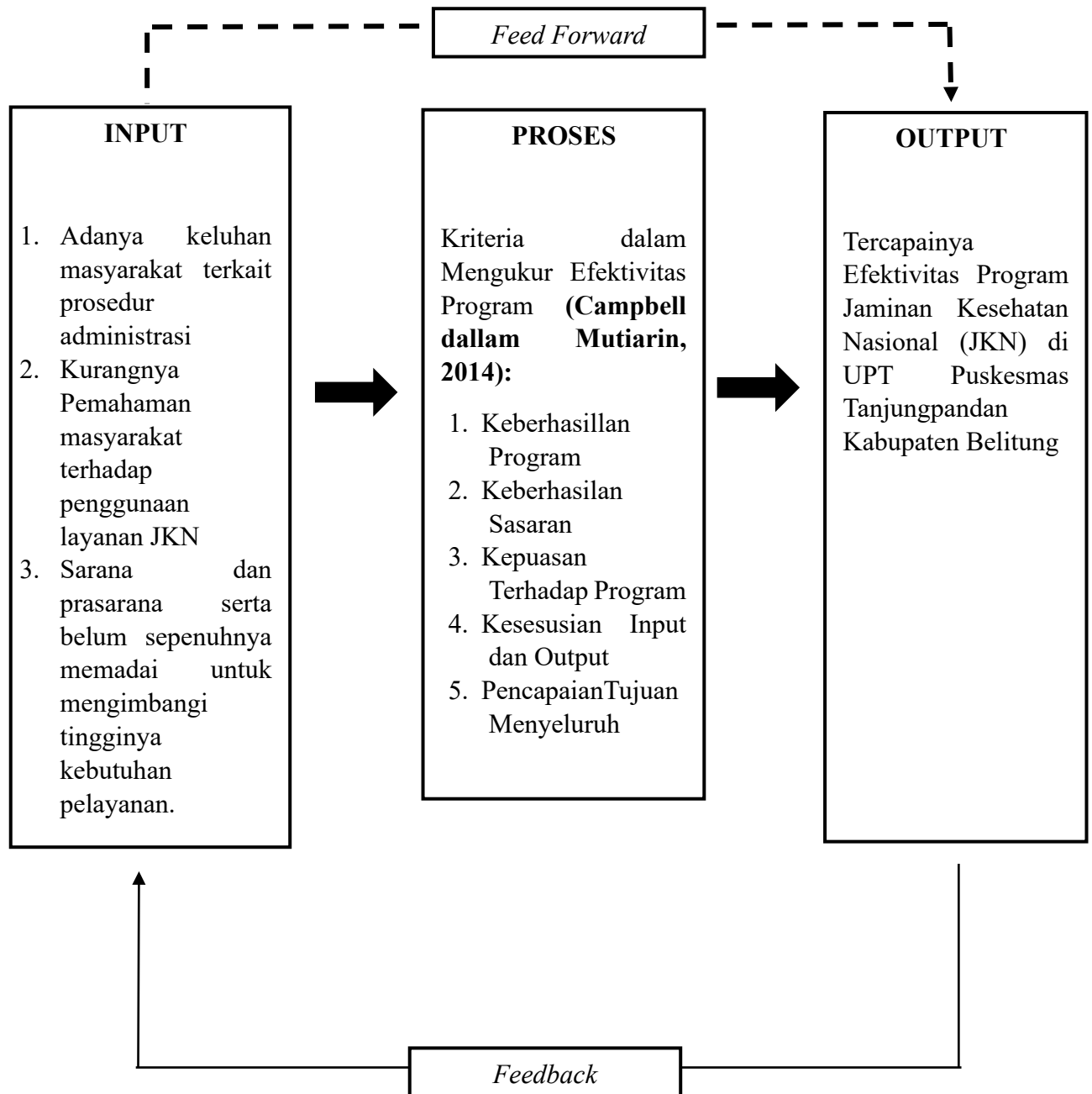
3. Tujuan program berkenaan dengan sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Sedangkan **Duncan dalam Streers** menjelaskan bahwa sejauhmana suatu organisasi dapat memperoleh dan menggunakan sumber daya yang ada untuk dapat mencapai tujuan operasionalnya. Dalam meneliti efektivitas maka diperlukan tiga konsep yang saling terkait harus dipertimbangkan secara bersamaan yaitu:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Pada kerangka berpikir ini, diharapkan dapat mempermudah pembaca untuk memahami alur pikiran peneliti. Efektivitas pada suatu program menjadi sebuah topik yang sangat menarik untuk diteliti, karena sebagaimana yang diketahui pada saat ini banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan berbagai kebijakan lalu di implementasikan dalam bentuk sebuah program akan tetapi belum tentu berjalan dengan efektif.

Agar kerangka berfikir diatas dapat lebih jelas dan lebih mudah dipahami, peneliti mencoba menggambarkan kerangka berpikir kedalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

(Diolah Oleh Peneliti 2026)

2.3 Proposisi

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan, Peneliti menyusun proposisi sebagai dugaan sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penyusunan proposisi ini dilakukan dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, guna memberikan arah dan batasan yang jelas dalam proses penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Efektivitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di UPT Puskesmas Tanjungpandan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Ditentukan Oleh Teori Campbell Dalam Mutiarin 2014 terdapat 5 dimensi yang sangat menentukan tercapainya keberhasilan efektivitas program, yaitu: Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Terhadap Program, Kesesuaian Input Dan Output Dan Pencapaian Tujuan Menyeluruh.
2. Terdapat Faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di UPT Puskesmas Tanjungpandan Kabupaten Belitung meliputi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, kendala koordinasi pelayanan, dan kurangnya arahan langsung kepada masyarakat yang kurang paham dengan penggunaan JKN sehingga pendaftaran manual kurang terkontrol.
3. Terdapat usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di UPT Puskesmas Tanjungpandan Kabupaten Belitung, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sistem pelayanan, peningkatan fasilitas pendukung

pelayanan kesehatan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan pemanfaatan layanan JKN.